KEBIJAKAN PENGEMBANGAN INOVASI DAN INVESTASI INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PARTISIPASI DAN PENDAPATAN PETANI

Studi Kasus: Kabupaten Blora, Jawa Tengah

Herman Supriadi dan Roosganda Elizabeth

Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Jalan A. Yani No. 70 Bogor 16161

ABSTRACT

Agricultural development policy program through technology innovation and infrastructure investment to improve farmer's income, known as a P4MI project, has been launched since 2003. Approach used in this program was that farmers are empowered by increasing their participation in planning and implementation of infrastructure investment in rural areas. This paper is aimed at the description of positive impact of policy on farmer's participation in rural agricultural development through technology innovation, institution's role and infrastructure investment support. Blora regency in Central Java was selected to represent poor natural resource (marginal dry land). Technology innovation introduced in rural areas consists of high yield variety of paddy and secondary crops and integrated agricultural technique. Most of the infrastructure investment that developed by participative approach is the construction of farm roads and irrigation facilities. The impact of such program has successfully increased the local community investment by 20 percent along with the improvement of farmer's income. The development of infrastructure investment has also been contributed to farm income in the ranges from 58.5 to 77.6 percent compared to non investment in infrastructure that could only contributed at about 33.7 to 58.5 percent out of the total household income.

Key words: innovation and investment, empowerment, participation, income, poor farmer

ABSTRAK

Program kebijakan pembangunan pertanian melalui pengembangan inovasi teknologi dan investasi infrastruktur untuk peningkatan pendapatan petani miskin, yang dikenal sebagai P4MI dilaksanakan sejak tahun 2003. Pendekatan yang digunakan dalam program tersebut adalah pemberdayaan petani secara partisipatif melalui perencanaan dan implementasi investasi sarana prasarana di pedesaan dalam rangka mendukung inovasi teknologi dan kelembagaan untuk peningkatan pendapatan petani miskin. Tulisan ini bertujuan mengemukakan dampak positif kebijakan partisipatif pembangunan pertanian pedesaan melalui inovasi teknologi maupun kelembagaan dan pembangunan investasi sarana prasarana pendukung pertanian. Kabupaten Blora, Jawa Tengah terpilih berdasarkan keterbatasan potensi SDA-nya (lahan kering marjinal). Inovasi teknologi yang dikembangkan meliputi introduksi varietas unggul padi dan palawija, serta teknik pengelolaan tanaman terpadu. Investasi infrastruktur yang dominan dikembangkan secara partisipatif berupa pembangunan jalan usahatani dan perbaikan sarana irigasi. Dampak pelaksanaan kegiatan program tersebut telah berhasil menumbuhkan tingkat investasi

masyarakat dalam investasi sebesar 20 persen dan peningkatan pendapatan petani. Program inovasi teknologi yang didukung pembangunan investasi infrastruktur memberikan kontribusi pendapatan usahatani lebih besar 58,5-77,6 persen dibanding dengan hanya inovasi teknologi (33,7-58,5%) dari pendapatan total rumah tangga.

Kata kunci: inovasi dan investasi, pemberdayaan, partisipasi, pendapatan, petani miskin

PENDAHULUAN

Inovasi teknologi menjanjikan kontribusi yang lebih besar terhadap peningkatan efisiensi pemanfaatan sumberdaya melalui pemanfaatan teknologi unggulan, antara lain dapat meningkatkan keunggulan kompetitif produk pertanian. Potensi pasar dan tingginya pertumbuhan permintaan merupakan potensi dan peluang untuk mengembangkan produk berdaya saing tinggi. Tantangan bagi penelitian dan pengembangan pertanian untuk mengantisipasi permintaan pasar tersebut adalah: (i) menciptakan teknologi yang mampu meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi pertanian; (ii) menciptakan nilai tambah dan meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumberdaya. Tantangan tersebut hendaknya mempertimbangkan tingkat potensi sumberdaya yang tersedia dan permintaan pasar (Adnyana dan Suryana, 1996).

Dalam rangka mempertahankan dan memperkuat ketahanan pangan nasional, memperluas serta memperkuat sumber pendapatan petani, maka diperlukan upaya pemanfaatan lahan kering yang masih tersebar luas di Jawa (Syam *et al.*, 1995a dan 1995b). Kondisi lahan kering yang marjinal (kurang subur, pH masam, rentan terhadap erosi, dan topografi berlereng dan bergelombang), menyebabkan rendahnya produktivitasnya dibanding sawah irigasi, yang mengindikasikan terkonsentrasinya wilayah (petani) miskin pada zona tersebut (Taryoto, *dalam* PSE, 1993). Selain itu, gejala kemiskinan lahan marjinal juga disebabkan oleh: (1) relatif rendahnya penguasaan teknologi pertanian; (2) kurang berfungsi dan belum meratanya sarana-prasarana dan kelembagaan sosial ekonomi; serta (3) relatif rendahnya kualitas sumberdaya manusianya.

Pemanfaatan dan pengembangan teknologi di lahan kering selama ini relatif tertinggal bahkan kurang diprioritaskan dibanding lahan irigasi. Dukungan fasilitas umum, rancangan pengembangan informasi dan diseminasi teknologi pertanian seringkali mengabaikan (bukan untuk) petani miskin. Kenyataan ini turut menjadikan mereka semakin terpuruk dan terperosok dalam perangkap kemiskinan. Suatu alternatif perbaikan insentif melalui pemberdayaan dan pengembangan kemampuan petani miskin, dan pengembangan daya dukung kelembagaan terkait, disertai inovasi penggunaan teknologi pertanian dan pemasaran berwawasan agribisnis, merupakan peluang emas untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka.

Program Peningkatan Pendapatan Petani Miskin melalui Inovasi (P4MI) bertujuan memberi dukungan pengembangan teknologi pertanian yang disertai pembangunan investasi desa untuk meningkatkan pendapatan petani di lahan marjinal. P4MI dilaksanakan sejak tahun 2003 yang menggunakan pendekatan partisipatif pengembangan kelembagaan di pedesaan. Kabupaten Blora terpilih dalam program pengentasan kemiskinan model P4MI sebagai kabupaten miskin yang mewakili Jawa Tengah. Kegiatan untama P4MI adalah pemberdayaan petani melalui inovasi teknologi (kelembagaan) dan pembangunan investasi sarana prasarana pendukung pertanian. Tulisan ini bertujuan mengemukakan dampak positif kebijakan partisipatif pembangunan pertanian pedesaan melalui inovasi teknologi maupun kelembagaan dan pembangunan investasi sarana prasarana pendukung pertanian.

PROGRAM PENINGKATAN PENDAPATAN PETANI MISKIN MELALUI INOVASI (P4MI)

P4MI merupakan salah satu penjabaran dari Undang-undang No.25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) tahun 2000-2004 (Anonimous, 2000), yang memberikan arah kebijakan dalam pembangunan ekonomi. Pada butir 21 disebutkan: "Melakukan berbagai upaya terpadu untuk mempercepat proses pengentasan masyarakat dari kemiskinan dan mengurangi pengangguran yang merupakan dampak krisis ekonomi". Kemiskinan yang melekat pada kehidupan mayoritas penduduk di pedesaan Indonesia, terlebih masa pasca krisis moneter. Sesuai prinsip keadilan, penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu upaya strategis dalam mewujudkan ekonomi kerakyatan, sehingga harus menjadi prioritas pembangunan nasional dan penanggulangannya harus segera dituntaskan.

Pada dasarnya tingkat kemiskinan suatu masyarakat berhubungan erat dengan kesenjangan distribusi pendapatannya (Prasetyawan, 1998). Artinya, kesenjangan distribusi pendapatan berkorelasi positif dengan besarnya proporsi rumah tangga miskin di suatu komunitas. Sudah sewajarnya bila program peningkatan pendapatan juga mempertimbangkan aspek-aspek perbaikan distribusinya. Peningkatan pendapatan petani terkait erat dengan pemberdayaan mereka dan penyediaan berbagai kebutuhan pokok dengan biaya terjangkau.

Sebelum P4MI, dikenal program Inpres Desa Tertinggal (IDT) hingga program Pemberdayaan Daerah Dalam Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi (PDMDKE), sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dan merupakan model pembangunan partisipatif (Sumodiningrat, 1999). Melalui P4MI, berbagai inovasi pembangunan pertanian diperkenalkan pada petani, didasarkan permasalahan yang teridentifikasi di lokasi proyek yang dikembangkan. Pemberdayaan masyarakat dimaksudkan agar pengetahuan teknis usahatani menjadi maju. Inovasi diperlukan

untuk melatih petani agar mampu mengemukakan pendapat, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, belajar bermusyawarah secara demokratis, dan pemerintah sebagai fasilitator semata. Arti pembangunan yang sebenarnya adalah mampu memberdayakan masyarakat agar dapat menolong diri sendiri. Dengan kata lain, pembangunan yang meniadakan suatu bentuk ketergantungan adalah pembangunan yang berkelanjutan. Komponen pengembangan sumber informasi nasional dan lokal, serta dukungan untuk pengembangan inovasi pertanian dan diseminasi. Partisipasi aktif masyarakat diperlukan melalui berbagai gagasan yang tepat untuk mewujudkannya.

P4MI menyadari pentingnya studi data dasar (baseline data) identifikasi potensi, kendala dan peluang pengembangan melalui pendekatan pastisipatif (PRA) untuk perencanaan, implementasi dan memudahkan evaluasi kegiatan. Melalui survei PRA di Kabupaten Blora terpilih Desa Ngliron, Got Putuk, Turi Rejo, Sembongin, dan Desa Bogorejo dari sepuluh desa, yang mewakili dataran rendah, dataran tinggi, daerah dekat dengan kota, dan desa-desa yang belum dan sudah mendapatkan inovasi dan investasi.

Tabel 1. Karakteristik Desa Contoh Penelitian di Kabupaten Blora, 2003/2004

Desa contoh	Kecamatan	Pola tanam dominan
Ngliron (n=29)	Jepon	Padi-padi-jagung
Got Putuk (n=31)	Ngawen	Padi-padi-bera
Turi Rejo (n=30)	Jepon	Padi-bera
Sembongin (n=30)	Banjarejo	Padi-palawija-bera
Bogorejo (n=30)	Bogorejo	Padi-palawija-bera

Sumber: Data Pertanian BPS Kabupaten Blora. 2003.

KARAKTERISTIK RUMAH TANGGA

Kabupaten Blora yang meliputi 237 desa memiliki penduduk miskin (prasejahtera) relatif tinggi. Selama tiga tahun terakhir jumlah penduduknya yang miskin cenderung semakin meningkat (BPS, 2003). Rataan usia KK petani contoh adalah 45,31 tahun (usia produktif), dengan rataan tingkat pendidikan 6,33 tahun, dimana pertanian sebagai pekerjaan utama (86%). Sebagian besar anggota rumah tangga juga termasuk usia kerja (61,57%). Terdapatnya penduduk yang bekerja sebagai buruh tani, buruh bangunan, sopir, pensiunan, penjual jasa/calo jual beli sepeda, dan TKI. Terindikasi bahwa pekerjaan pertanian kurang diminati oleh kalangan generasi muda. Namun bila telah menikah, sektor tersebut merupakan pekerjaan pilihan akhir yang dapat memberikan rasa aman.

Sebagian besar dinding rumah petani sampel terbuat dari kayu, berlantai tanah. Rata-rata luas tanah dan bangunan relatif sempit (sekitar 459m²), meski ada yang mencapai 4000m², yang umumnya ditanami buah-buahan, empon-empon, atau untuk kandang ternak. Untuk sanitasi sebagian besar responden sudah

mempunyai MCK pribadi, meski masih terdapat beberapa keluarga yang menggunakan sumur jumbleng/wc cemplung, sungai, dan MCK umum. Sedangkan untuk penerangan rumah sebagian besar sudah menggunakan listrik dari PLN.

PENGUASAAN ASET RUMAH TANGGA

Lahan usahatani merupakan aset penting bagi rumah tangga di pedesaan. Rata-rata responden di lokasi memiliki satu persil lahan sawah tadah hujan, dengan rataan luas sekitar 0,69 Ha. Luas minimum penguasaan lahan sawah tadah hujan 0,02 ha, dan terdapat rumah tangga yang menguasai lahan hingga 8,70 ha. (Tabel 2). Di Desa Ngliron sampel yang memiliki lahan sawah relatif lebih sedikit dibanding desa penelitian lainnya. Oleh Dinas Kehutanan, beberapa penduduk diberi hak sewa di lahan kebun jati, selama pohon jati masih muda dengan kewajiban memeliharanya. Di antara tanaman jati mereka menanami tanaman pangan seperti padi gogo dan palawija.

Tabel 2. Penguasaan Lahan di Lokasi Desa Contoh Kabupaten Blora

Jenis Lahan	Comple (n)	0/ sammla	Luas Penguasaan (Ha)			
	Sample (n)	% sample -	Min.	Maks.	Rataan	
Sawah Tadah Hujan	122	64,55	0,02	8,70	0,69	
Sawah Irigasi	3	1,58	0,20	0,50	0,31	
Tegal/Ladang	51	26,98	0,02	2,50	0,41	
Kebun	8	4,23	0,03	1,14	0,33	
Kolam	1	0,005	0,01	0.01	0,01	
Lainnya	4	2,11	0,20	0,50	0,36	

Sumber: Data Primer Diolah.

Disamping lahan sawah, sekitar 22 rumah tangga (40%) menguasai lahan tegalan/ladang, yang ditanami palawija seperti kedelai, jagung, ketela pohon, dan kacang hijau. Penguasaan lahan di Desa Got Putuk, Turi Rejo, Bogorejo relatif sangat kecil, terlebih di Desa Ngliron. Di Desa Sembongin penguasaan lahan relatif luas, dan terkait erat dengan pendapatan dari usahataninya yang relatif lebih tinggi. Jumlah rumah tangga yang menguasai kebun dan kolam relatif sedikit. Distribusi rumah tangga contoh berdasarkan penguasaan lahan dikemukakan secara rinci pada Tabel 3.

Rumah tangga petani umumnya memelihara sapi, di Desa Ngliron (44,83%) Got Putuk (80%), Turi Rejo (73,33%), Sembungin (70%), dan Bogorejo (73,33%). Sapi juga digunakan untuk mengolah lahan. Selain itu, sapi, kambing, dan ayam juga berfungsi sebagai tabungan dan dijual untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga. Aset rumah tangga yang berupa alsintan adalah *tresher*, traktor tangan, alat penyemprot hama, dan pompa air. Adapun alat transportasi

yang relatif banyak dimiliki penduduk adalah sepeda dan sepeda motor. Sepeda motor umumnya juga digunakan sebagai alat untuk menghasilkan pendapatan (ojek). Pemilikan alat rumah tangga seperti radio, televisi, kulkas, dan sebagainya masih merupakan barang mewah bagi mereka. Penduduk umumnya mengutamakan membeli ternak dibanding alat kemewahan ini, karena tidak dapat diandalkan sebagai tabungan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga yang penting dan mendadak.

Tabel 3. Distribusi Rumah tangga Sampel menurut Penggunaan lahan di Kabupten Blora

Jenis lahan	Ngliron N=29		0 1		Turi Rejo N=30		Sembungin N=30		Bogorejo N=30	
Jenis ianan	n	ha	n	ha	n	ha	n	ha	n	ha
Sawah tadah hujan	10	0,13	30	0,65	29	0,45	29	1,28	24	0,58
Sawah irigasi	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0,31
Ladang	14	0,25	2	0,19	6	0,27	7	0,17	22	0,64
Kebun	3	0,08	0	0	2	0,67	1	0,50	2	0,29
Kolam	0	0	0	0,01	0	0	0	0	0	0
Lainnya, Kebun Jati	4	0,65	2	0,01	0	0	0	0	0	0

Sumber: Data Primer Diolah.

KELEMBAGAAN TERKAIT USAHATANI

Permodalan

Modal merupakan sarana produksi pertanian yang penting. Lebih dari 50 persen responden (bahkan 80% responden di Desa Bogorejo) menyatakan dapat memenuhi sendiri modal usahatani.

Tabel 4. Responden yang Kekurangan Modal Saat Persiapan Tanam, tahun 2003/2004

Desa Penelitian	Responden (%)
Ngliron	48,28
Got Putuk	80,65
Turi Rejo	73,33
Sembungin	43,33
Bogorejo	34,49

Sumber: Data primer diolah.

Para responden umumnya mengalami kekurangan modal, terutama saat persiapan tanam (Tabel 5). Sebagian besar responden (kecuali di desa Bogorejo) yang kekurangan modal usahatani meminjam kepada keluarga. Di Desa Sembongin, alternatif lain pengadaan modal usahatani adalah meminjam ke koperasi (40%), atau ke bank (3-20%). Umumnya pinjaman modal di bayar sehabis panen dengan uang hasil penjualan sebagian hasil panen padi. Sebagian hasil panen disimpan untuk konsumsi atau dijual sedikit demi sedikit untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Sarana Produksi dan Pemasaran

Penggunaan pupuk dan obat-obatan sudah sangat melembaga dan cenderung tergantung kemampuan daya beli petani, bukan berdasar rekomendasi. Pemasaran umumnya dilakukan di rumah petani, secara tunai, dan tidak terikat (Tabel 5).

Tabel 5. Sistem Pemasaran Padi di Desa Contoh di Kabupaten Blora. 2003/2004

Uraian	Ngliron	Got Putuk	Turi rejo	Sembongin	Bogorejo
Lokasi pemasaran (%):	_				
Ladang	3,4	19,4	3,3	16,7	10,0
Rumah	24,1	41,9	43,3	70,0	60,0
Pasar	33,4	3,2	30,0	10	10,0
Lainnya	13,8	16,1	3,3	3,3	0
Ladang&rumah	25,3	19,4	20,1	0	20,0
Pembeli (%):					
Ped.pengumpul	24,1	58,1	80	90	73,3
Ped.kec.	6,9	9,7	0	0	3,3
Ped.kab.	3,4	3,2	0	0	0
Pengolah	3,4	12,9	0	0	0
Lainnya	62,2	16,1	20	10	20,1
Ped.Ds,Kec.	0	0	0	0	3,3
Cara pembayaran (%):					
- Tunai	44,8	100	80	60	80
 Bayar kmdn 	55,2	0	20	40	20
Tdk ada ikatan	44,8	83,0	80	80	80
Ikt.pinjm	0	0	0	0	0
Langganan	55,2	17,0	20,0	13,3	20,0
Keluarga	0	0	0	6,7	0
Penentu harga (%):					
Pedagang	85,5	83,9	90	83,3	83,3
Kompromi	10,2	9,7	10	13,4	16,7
Lainnya	4,3	6,4	0	3,3	0
Penentu penjualan:					
Suami	8,9	22,6	40,0	36,7	30,0
Istri	17,2	19,4	3,3	16,7	26,7
Kompromi	58,6	48,4	53,3	40,0	43,3
Lainnya	15,3	9,6	3,4	6,6	0

Sumber: Data Primer Diolah.

Penyuluhan

Petani umumnya telah berpengalaman usahatani karena proses sosialisasi melalui lembaga keluarga, penyuluhan, alat komunikasi, dan interaksi antar petani. Intensitas interaksi dengan lembaga penyuluhan sangat berpengaruh terhadap penerapan teknologi baru untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian, meski diakui bahwa jarang ada pertemuan, jarang ikut pertemuan, dan bahkan tidak

pernah ikut pertemuan. Lemahnya peran kelembagaan penyuluhan menyebabkan kurang efektifnya kinerja penyuluh. Di samping itu, petani umumnya menerapkan teknologi baru jika teman sesama petani yang menerapkannya sudah berhasil.

Teknologi Usahatani

Teknologi usahatani (pemakaian bibit yang bermutu tinggi, pemupukan berimbang, teknologi pengolahan, cara bercocok tanam, pemberantasan hama dan penyakit, teknologi panen, dan teknologi pasca panen) yang diintroduksikan, diperoleh hanya relatif kecil (kurang dari 30%), dan tidak sepenuhnya diterapkan petani (antara 1-30%) karena keterbatasan modal.

Tabel 6. Keragaan Teknologi Usahatani Pangan Tingkat Petani

			D	esa		
Uraian	Ngliron	Got Putuk	Turi Rejo	Sembongin	Bogorejo	Rataan
1. Pola tanam	Pd-Jg Pd-Br	P-Jg-jg P-Br	P-jg-jg p-jg	p-p-jg p-p	P-Jg P-Cb	
2. Padi						
a. Luas (ha)	0,30	0,33	0,33	1,21	0,42	0,52
b. Benih (kg/ha)	51,30	53,3	53,3	62,0	42,9	56,6
c. Pupuk (kg/ha)						
- Urea	369,3	359,2	443,0	317,8	328,6	363,7
- TSP	95,3	128,3	56,7	21,8	77,6	74,7
- SP36	7	31,4	110,9	136,8	60,2	69,3
- KCl	0	6,9	0	17,1	15,7	7,9
- ZA	0	2,2	6,1	0	12,4	4,1
- PPc	0	1,0	0,06	0,4	4,0	1,1
- Kandang	291,7	983,3	1680,6	490,0	1145,2	918,2
- Alternatif	0	0	0	0	0,5	0,1
d. Pestisida						
- Padat (kg/ha)	0,7	1,6	8,5	0,3	0,9	2,4
- Cair (l/ha)	0,3	1,1	6,1	2,6	0,9	2,2
3. Jagung						
a. Luas (ha)	0,24	0,26	0,3	1,27	0,47	0,51
b. Benih (kg/ha)	12,8	16,2	14,3	17,2	19,0	16,0
c. Pupuk (kg/ha)						
- Urea	96,7	139,2	229,7	288,4	215,5	193,9
- TSP	30	80,8	0	5,8	42,6	31,8
- SP36	0	0	27,7	100,5	76,4	40,9
- KCl	0	38,5	0	0	5,3	8,8
- ZA	0	0	0	0	4,3	0,9
- PPc	0	0	0	0	6,8	1,4
- Kandang	160	1538,5	1287,7	74,6	1465,5	905,3
d. Pestisida						
- Padat (kg/ha)	1,2	1,5	0,07	0	1,7	0,9
- Cair (l/ha)	0,04	1,2	6,0	1,3	0,2	1,7

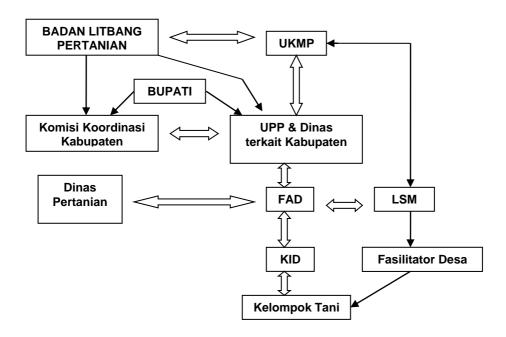
Sumber: Data Primer diolah.

PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PENDUKUNG

Implementasi pemberdayaan kelompok tani untuk peningkatan pendapatan memerlukan perencanaan yang partisipatif dan ditunjang oleh pengembangan kelembagaan secara terpadu (Bagan 1). Pelaksanaan program secara keseluruhan dikoordinir oleh Unit Koordinasi Monitoring Proyek (UKMP), yang di dalamnya terdapat tim konsultan yang berhubungan kerja dengan beberapa lembaga penelitian.

Di tingkat kabupaten, bupati bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pemberdayaan petani dengan membentuk dan mengetuai Tim Koordinasi Kabupaten (TKK) dan Unit Pelaksanaan Proyek. Anggota TKK meliputi berbagai instansi terkait, LSM dan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP). UPP bertanggung jawab untuk mengelola, mengkoordinasikan, dan memonitoring kegiatan proyek.

Investasi desa disetujui oleh Forum Antar Desa (FAD) dan dilaksanakan oleh Komite Investasi Desa (KID). FAD dibentuk di tingkat kecamatan yang beranggotakan: ketua KID masing-masing desa dan seorang fasilitator desa. KID dibentuk di setiap desa yang terdiri dari lima orang yang dipilih masyarakat secara partisipatif dibantu oleh fasilitator. Fasilitator desa terdiri dari dua orang (pria dan wanita) yang merupakan wakil LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat).



Bagan 1. Organisasi dan Mekanisme Kinerja P4MI

INOVASI TEKNOLOGI DAN INVESTASI

Kebijakan pengentasan kemiskinan petani dengan inovasi dan investasi telah disosialisasikan oleh Bupati dan pejabat terkait secara partisipatif sebelum pelaksanaan program. P4MI merupakan program upaya pembangunan pertanian dan pedesaan secara partisipatif dan bertahap (2003-2007) dalam bentuk infrastruktur dan inovasi guna meningkatkan pendapatan petani miskin. Oleh karena itu, dana bantuan dapat digunakan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi desa, membangun sarana umum tingkat desa seperti jalan ke lahan usahatani, jaringan irigasi, dam atau sejenisnya, dan sebagainya. Setiap desa mendapat bantuan sebesar Rp.270.000.000,- langsung kepada masyarakat, dimana masyarakat yang menentukan bentuk inovasi dan investasi yang dibutuhkan.

Tabel 7. Beberapa Inovasi dan Investasi di Desa Penelitian, di Kabupaten Blora, tahun 2003

Desa Contoh	Inovasi Teknologi	Investasi
Ngliron	Jagung Maros	-
Got Putuk	Padi Organik	Bendungan, Saluran Air
Turi Rejo	PTT Padi	-
Sembongin	Jagung Maros	Embung, Kios Saprodi,
-		Demplot Kambing
Bogorejo	Bw. Merah, Pengembangan	Rehab cek dam, Saluran Air
	jagung	

Sumber: Data Pertanian BPS Kabupaten Blora. 2003/2004.

Untuk menjamin agar program bisa terlaksana secara partisipatif sesuai kebutuhan masyarakat, dibentuklah suatu kelembagaan KID (Komite Investasi Desa) sebagai perencana dan pelaksana program. Partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan program cukup besar mencapai 18-20 persen, terutama dalam menyumbangkan tenaga kerja dan tambahan bahan bangunan (Tabel 8). Secara keseluruhan, total investasi tahun 2003 mencapai Rp. 2,8 milyar dengan tingkat partisipasi masyarakat sekitar 20 persen. Pada tahun 2004, total dana investasi meningkat menjadi Rp.9,8 milyar dengan tingkat partisipasi masyarakat sekitar 18,7 persen.

Tabel 8. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Investasi Infrastruktur, tahun 2003-2004

Sumber Dana —	Tahun Anggarar	n 2003	Tahun Anggara	Tahun Anggaran 2004		
Sumber Dana	(Rp.000)	(%)	(Rp.000)	(%)		
Loan ADB	2.310.820	79,92	7.396.200	81,32		
Masyarakat	463.954	20,08	1.381.587	18,68		
Total	2.774.774	100,00	9.777.787	100,00		

Sumber: Laporan Kemajuan PFI3P, 2004.

Di desa Got Putuk, sebagian dana yang diterima dalam bentuk investasi dan inovasi sudah digunakan untuk membangun *cek dam*. Di desa Sembongin, telah diperbaiki embung yang terlantar (masyarakat tidak memiliki dana untuk memperbaikinya) sehingga akhirnya dapat mengairi kembali sawah di sekitarnya. Di desa Bogorejo, *cek dam* dan saluran air irigasi telah direhabilitasi dengan partisipasi masyarakat sehingga mereka dapat meningkatkan produksi jagung dan bawang merah sebagai komoditas andalannya. Kelangsungan kelembagaan lokal yang dapat memelihara berbagai sarana dan prasarana yang telah dibangun tersebut masih perlu diperhatikan. Selain itu, manfaat inovasi dan investasi pada program kebijakan pembangunan P4MI secara langsung maupun tidak langsung juga mempengaruhi pendapatan dan pengeluaran rumah tangga petani di pedesaan.

DAMPAK PENGEMBANGAN INOVASI DAN INVESTASI

Secara umum rataan pendapatan usahatani lebih dominan dari luar usahatani dan bukan usahatani (Tabel 9). Kontribusi pendapatan usahatani 72,6 persen, dari luar usahatani 2,1 persen dan bukan usahatani 25,3 persen. Di Desa Ngliron kontribusi pendapatan usahatani justru lebih kecil dari bukan usahatani.

Pendapatan usahatani di Desa Ngliron adalah yang paling rendah yaitu Rp.1.116.300/keluarga/tahun, 33,7 persen dari pendapatan total keluarga, sedang di Desa Turirejo berkisar Rp.2.782.900. Sedangkan desa yang telah menerima program inovasi dan investasi, seperti Desa Got Putuk, Sembongin dan Bogorejo memiliki kisaran pendapatan usahatani rumah tangga Rp.2.996.000 hingga Rp.7.593.200 (atau berkisar 58,5-77,6%). Usaha ternak memberikan pendapatan dominan di Desa Ngliron (17,3%) di Desa Turirejo (19,4%) dan Bogorejo (17,6%). Usahatani padi dominan memberikan sumbangan pendapatan bersih di Desa Got Putuk (42,5%), Turirejo (20,1%) dan Sembongin (57,3%). Usahatani palawija hanya di Bogorejo yaitu sebesar 18,5 persen. Kontribusi dari usaha berburuh tani secara umum relatif kecil, berkisar 0,3-5,8 persen; di Ngliron (5,7%) dan Turirejo (5,8%).

Kontribusi usaha bukan pertanian berkisar antara Rp.1.658.500 hingga Rp.2.433.200 atau antara 20,6 persen (Sembongin) hingga 60,6 persen (Ngliron). Kontribusi dari profesi pegawai tertinggi di Desa Ngliron (34,5%), Got Putuk (13,7%), Sembongin (17,6%) dan Bogorejo (16,6%). Usaha dagang memberikan kontribusi tertinggi di Turirejo sebesar 21,5 persen terhadap pendapatan total. Kegiatan lain yang cukup memberi kontribusi terhadap pendapatan yaitu industri, buruh bangunan dan tukang bangunan.

Tabel 9. Perbandingan Rataan Pendapatan antara Desa yang Sudah dan Belum mendapat Investasi Infrastruktur di Kabupaten Blora tahun 2003/2004¹

G 1	Rata-rata Pendapatan (Rp 000/tahun) ²						
Sumber	Ino	vasi	In	Inovasi + Investasi			
Pendapatan	Ngliron	Turi Rejo	Got Putuk	Sembongin	Bogorejo	Rataan	
A. Usahatani	1116,3	2782,9	4190,6	7593,2	2996	5775,6	
sendiri	(33,7)	(58,5)	(62,4)	(77,6)	(60,7)	(72,6)	
- Padi	290,1	955,6	2850,3	5609,5	662,1	3399,4	
	(8,8)	(20,5)	(42,5)	(57,3)	(12,2)	(42,7)	
- Palawija	52,3	488,7	124,1	1098,7	913,1	956,4	
	(1,6)	(10,3)	(1,8)	(21,3)	(18,5)	(12)	
- Hortikultura	92,4	214,7	224,3	33,3	595,6	297,3	
	(2,8)	(4,5)	(3,3)	(0,3)	(16,1)	(3,7)	
- Ternak	573,7 (922,2	991,9	860,7	870	1046	
	17,3)	(19,4)	(14,8)	(8,8)	(17,6)	(13,4)	
- Perkebunan	107,.8	201,7	0	0	15	76,5	
	(3,3)	(4,2)			(0,3)	(1)	
B. Luar usahatani							
- Buruhtani	187,4	274,3	88,7	171	15	165,1	
	(5,7)	(5,8)	(1,3)	(1,7)	(0,3)	(2,1)	
C. Bukan	2003,8	1698,5	2433,2	2021,1	1920,6	2015,5	
Usahatani	(60,6)	(35,7)	(36,2)	(20,6)	(32,9)	(25,3)	
- Dagang	165,5	1023,7	530	27,9	245	406,7	
2 484118	(5)	(21,5)	(7,9)	(0,3)	(4,5)	(5,1)	
- Buruh bangunan	224,1	245,3	245,3	66,9	0	121,4	
Č	(6,8)	(5,2)	(3,6)	(0,7)		(1,5)	
-Tk. bangunan	0	183,3	0	206,2	184,5	115,6	
		(3,9)		(2,1)	(3,7)	(1,5)	
- Jasa transportasi	189,0	26,7	13,5	0	180	82.9	
•	(5,7)	(0,6)	(0,2)		(3,6)	(1)	
- Pegawai	1140,6	80,8	922,7	1730	820	935,3	
	(34,5)	(1,7)	(13,7)	(17,6)	(16,6)	(11,8)	
- amb.di alam bbs	37,8	80	36	0	0	30,7	
	(1,1)	(1,7)	(6)			(0,4)	
- Industri	253,7	193	405,7	0	318,5	234,1	
	(7,7)	(4)	(6)		(6,5)	(2,9)	
- Buruh industri	0	38	13,3	0	12	12,8	
		(0,8)	(0,2)		(0,2)	(0,2)	
- Pemberian	0	0	1,7	0	111,7	22,8	
			(0,02)		(2,3)	(0,3)	
- Lainnya	0	0	265	0	0	53,4	
			(3,9)			(0,7)	
D. Total	3307,5	4755,7	6712,5	9785,3	4931,6	7956,2	
	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	

Sumber : Data primer diolah.

Keterangan : Angka dalam kurung menyatakan persen.

Tabel 10. Rata-rata Pengeluaran Rumah tangga di Desa yang Sudah dan Belum mendapat Investasi di Kabupaten Blora, 2003/2004

T:-	Rata-rata pengeluaran rumah tangga							
Jenis Pengeluaran	Inc	ovasi	In	Inovasi + Investasi				
i engeruaran	Ngliron	Turi Rejo	Got Putuk	Sembongin	Bogorejo	Rataan		
Beras	799,97	896,98	853,55	865,70	973,48	848,67		
	(26,9)	(19,2)	(18,2)	(11,6)	(17,4)	(17,1)		
Kopi/gula	118,17	341,53	221,38	428,88	383,59	288,77		
	(4,0)	(7,3)	(4,7)	(5,7)	(5,7)	(5,8)		
Lauk pauk	638,62	1211,97	1667,24	1976,52	1388,28	1330,64		
	(21,5)	(26,0)	(35,6)	(26,5)	(24,9)	(26,79)		
Rokok	70,21	363,31	196,2	644,43	491,28	341,31		
	(2,4)	(7,8)	(4,2)	(8,6)	(8,8)	(6,9)		
Lainnya	40	217,24	244,14	398,07	158,83	204,47		
	(1,3)	(4,7)	(5,2)	(5,3)	(2,8)	(4,1)		
Sabun	229,03	331,59	265,03	275,48	224,87	256,36		
	(7,7)	(7,1)	(5,7)	(3,7)	(4,0)	(5,2)		
Pendidikan	422,2	399,66	527,52	561,86	1084,97	579,27		
	(14,2)	(8,5)	(11,3)	(7,5)	(19,4)	(11,7)		
Pakaian	158,14	265,17	211,03	400,93	177,07	234,39		
	(5,3)	(5,7)	(4,5)	(5,4)	(3,2)	(4,7)		
Kesehatan	65,34	107,7	175,0	226,21	55,17	121,69		
	(2,2)	(2,3)	(3,7)	(3,0)	(1,0)	(2,5)		
Rekreasi	4,48	44,83	39,66	157,59	37,93	41,67		
	(0,1)	(1,0)	(0,9)	(2,1)	(0,7)	(0,8)		
Sosial	280,86	539,66	409,66	891,03	462,24	499,47		
	(9,4)	(11,6)	(8,7)	(11,9)	(8,3)	(10,1)		
Renovasi rmh	145,5	103,4	36,72	622,41	132,07	201,23		
	(5,0)	(2,2)	(0,8)	(8,3)	(2,4)	(4,1)		
Listrik/BBM	2,07	-	-	18,97	11,80	6,35		
	(0,1)			(0,2)	(0,2)	(0,1)		
Total	2974,72	4662,3	4684,89	7468,09	5581,56	4967,49		
	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)		

Sumber: Data Primer diolah.

Pengeluaran rumah tangga petani sangat bervariasi dan masih didominasi oleh kebutuhan pangan terutama lauk pauk dan beras (±50% dari total pengeluaran) seperti pada Tabel 10. Kebutuhan yang relatif besar lainnya adalah untuk pendidikan (7,5-19,4%) dan sosial (sumbangan dan hajatan) sebesar 2,3-11,9 persen. Pengeluaran untuk kesehatan, perbaikan rumah, rekreasi dan listrik/bahan bakar sangat kecil.

Keberhasilan suatu program pembangunan sangat ditentukan oleh pemahaman berbagai pihak yang terkait di tingkat pusat dan daerah. Pemahaman terhadap program dapat meningkatkan partisipasi masyarakat sasarannya. Proses pelembagaan program sangat ditentukan oleh sosialisasi kepada masyarakat, sehingga program pembangunan dapat memenuhi sasarannya dengan tepat. Partisipasi masyarakat merupakan proses pemberdayaan mereka untuk dapat aktif menerapkan program pembangunan tersebut. Manfaatnya terindikasi pada

kemampuan petani miskin dalam mengadopsi dan menerapkan inovasi dan investasi yang diberikan pada pelaksanaan suatu program pembangunan. Manfaat lain adalah memberdayakan dan meningkatkan kemampuan petani miskin dalam mengantisipasi dan mengembangkan kemampuan diri agar dapat berkembang dan mandiri. Pemberdayaan petani miskin tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah, tetapi partisipasi mereka juga menjadi kunci sukses upaya pemberdayaan.

PENUTUP

Pemberdayaan petani miskin memerlukan perencanaan dan implementasi pengembangan secara partisipatif yang didukung oleh kelembagaan pendamping (dinas terkait, LSM), lembaga pelaksana dari masyarakat sendiri, dan fasilitator tingkat desa. Bupati berperan penting dalam sosialisasi program aksi kepada masyarakat, sebagai penggerak instansi terkait dan elemen masyarakat untuk keefektifan implementasi program. Keberpihakan pemerintah daerah hendaknya dimulai sejak perencanaan, sosialisasi kepada masyarakat, pelaksanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi.

Inovasi teknologi adopsi varietas unggul dapat meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas yang dikembangkan. Dengan inovasi teknologi saja belumlah cukup untuk mengentaskan kemiskinan. Diperlukan dukungan pembangunan investasi sarana prasarana pendukung pertanian. Transparansi program dan pendanaan serta kejelasan manfaat diperlukan untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pemberdayaan. Tingkat partisipasi masyarakat dalam program aksi pengentasan kemiskinan cukup besar, yang tergantung pada pendekatan partisipatif yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Untuk mencapainya diperlukan upaya pemberdayaan dari pihak terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnyana, M.O. dan A. Suryana. 1996. Pengkajian dan Pengembangan Sistem SUP Berorientasi Agribisnis. Makalah disampaikan pada Raker Badan Agribisnis, Wisma Kinasih. Bogor.
- Anonimous. 2000. Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) tahun 2000-2004.
- Anonimous. 2003. Petunjuk Umum Rencana Pelaksanaan Poor Farmer Income Improvement Through Innovation Project, atau Peningkatan Pendapatan Petani Miskin elalui Proyek Inovasi. Bantuan Asian Development Bank di Kabupaten Blora.

- BPS. 2003. Data dan Informasi Kemiskinan, Tahun 2003. buku I. Provinsi Badan Pusat Statistik Jakarta Indonesia.
- BPS. 2003. Profil Pertanian Kabupaten Blora tahun 2003.
- BPS. 2002. Kabupaten Blora dalam Angka. Badan Pusat Statistik Bappeda. Kabupaten Blora.
- Kasryno, F., and A. Suryana. 1992. Long Term Planning for Agricultural Development Related to Poverty Alleviation in Rural Areas; *dalam* Pasandaran, E. *et al* (Eds.). Poverty Alleviation with Sustainable Agricultural and Rural Development in Indonesia. Proceeding of National Seminar and Workshop, Bogor Indonesia.
- PFI3P. 2004. Laporan Kemajuan. PFI3P.
- Prasetyawan, W. 1998. Perlu Langkah Konkrit Mengatasi Penduduk Miskin. Bisnis Indonesia.
- Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanah dan Agroklimat. 2002. Optimalisasi Pemanfaatan Sumberdaya Lahan untuk Peningkatan produksi Pertanian. Makalah dipresentasikan pada Seminar nasional Inovasi Agribisnis, 21-22 Mei. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
- Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. 1993. Rangkuman Hasil Penelitian Identifikasi Wilayah Miskin di Indonesia dan Alternatif Upaya Penanggulangannya 1992/1993. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian Bogor.
- Sumodiningrat, G. 1999. Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial. Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Syam, A., K. Kariyasa, dan M.O. Adnyana. 1995a. Sustainable Technology Adoption of Farming System Upland Conservation in Brantas Watershed, a Joint Research Project of CRIFC and ESCAP.
- Syam, A., K. Kariyasa, dan M.O. Adnyana. 1995b. Penelitian Pengembangan Sistem Usahatani Konservasi di Lahan Kering Marginal di Garut Jawa Barat. Laporan Teknis Puslitbang Tanaman Pangan. Bogor.